

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 angka 6 memberikan definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut **Haw Widjaja (2002:98)** Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila di telaah dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Otonomi Daerah mengandung arti jumlah atau besar nya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintahan yang diarahkan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi isi rumah tangga daerah. Otonomi daerah berlandaskan pada dasar pada perundang-undangan yang kuat yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari dasar undang undang tersebut diatas bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah di jalan secara optimal. Dalam UUD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945 isi yang terkandung dalam penjelasannya adalah menjadi pedoman dalam penyusunan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan wajib menjalankan prinsip- prinsip pembagian kewenangan berdasarkan atas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasar asas desentralisasi dan dekonsentralisasi adalah daerah provinsi. Sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian daerah diluar provinsi dibagi habis kedalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi dalam daerah.

Menurut **Sedarmayanti, (2004:9)** Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup sebagai berikut :

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Melaksakanan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi , kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti : 2009 : 10)

Pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah peraturan daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Dari pengertian diatas, dapatlah diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.

Penyelenggaraan pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dan memberdayakan masyarakat Desa dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (Otonom Desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. perlu menetapkan peraturan menteri dalam Negeri tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Otonomi daerah merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Haw Widjaja, 2010 : 165).

2.3. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut **C.S.T. Kansil (2001 : 58)** Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsanya masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Dalam peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa otonom merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu desa otonom mempunyai kewenangan yang penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan sendiri. Mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan negara.

Pembentukan desa baru dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, disamping itu sebagai perwujudan pembangunan demokrasi dan pendidikan politik bangsa pada tingkat lokal. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan harus memenuhi syarat sebagai berikut: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, prangkat sarana dan prasarana pemerintah. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 21 Tentang Desa.

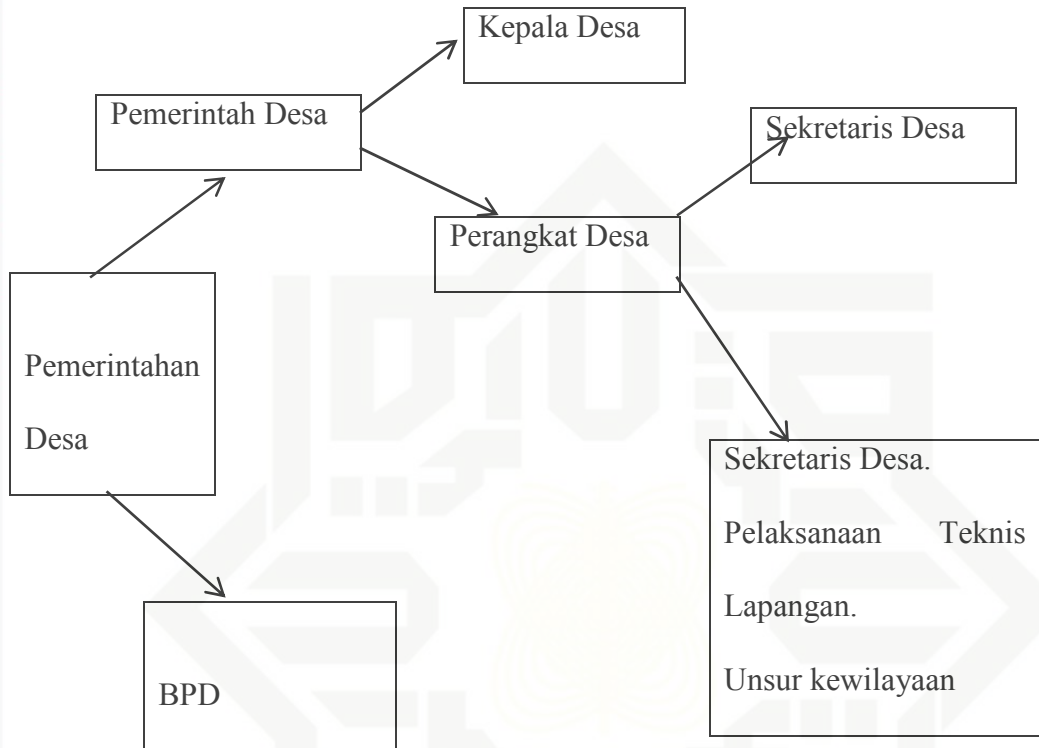
Untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa . Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar I

Skema Penyelenggara Pemerintahan



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Bab IV Bagian I, II, dan IV.

Skema di atas memuat jumlah perangkat Desa di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja perintahan Desa yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang kurangnya memuat yaitu : Tata cara penyusunan struktur organisasi, perangkat, Tugas dan fungsi serta Hubungan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 115, 116, 117, menjelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan dalam melaksanakannya didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup: Penyelenggaraan pemerintah Desa, Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah Desa, Organisasi dan tata pelaksanaan pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Profil Desa, Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya tersedianya Peta Desa yang lengkap yang menggambarkan desa dari segi: wilayah administrasi pemerintahan desa, peta potensi desa (alam, pertanian, tambang, flora, fauna,dan sebagainya), peta prasarana/sarana didesa (ekonomi, sosial budaya dan sebagainya), peta yang menggambarkan kondisi kependudukan, keadaan dan permasalahannya.

Jika dilihat dari pembangunan desa maka dapat didefenisikan sebagai” rangkain usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).” Apabila definisi sederhana tersebut disimak secara cermat, akan muncul permukaan paling sedikit tujuh ide pokok yaitu:

1.Pembangunan merupakan suatu proses.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas (sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sitem budaya yang kuat tetapi fleksibel).
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per defisi* bersifat multidimensional (mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengejawanta dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan).
7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa tersebut.

Selain itu diperlukan juga analisa data, keadaan desa permasalahannya serta tokoh pemuda/masyarakat, tenga ahli/terdidik, kader pembangunan desa dan sebagainya. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dan rencana pembangunan Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

2.4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala Daerah. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa harus berfungsi sebagai mana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah Desa yang didampingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah Desa yang lebih baik.

2.5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Desa

Menurut Kamus Besar Indonesia (1995 : 113), definisi fungsi adalah kegunaan suatu hal, kedudukan faal (kerja suatu bagian tubuh). Sjchran Basah mengatakan bahwa fungsi menurut *Natuurwissenchaft* mempunyai empat arti sedangkan dalam *Geisteswissenchaft* mempunyai tiga arti yaitu :

1. Fungsi berarti tergantung pada (pengertian pertama dari *Natuurwissenchaft*).
2. Fungsi berarti tugas atau *ambtwerkingin bet verband met bet gebeel* (arti kedua dari *Natuurwissenchaft* dan arti pertama dari *Geisteswissenchaft*).
3. Fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian keseluruhan (arti ketiga dari *Natuurwissenchaft* dan arti kedua dari *Geisteswissenchaft*).
4. Fungsi berarti *werking/baca*, pekerjaan (arti keempat dari *Natuurwissenchaft* dan arti ketiga dari *Geisteswissenchaft*).

Menurut Thoha (1990:25) fungsi dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soekanto (1990: 628) fungsi meliputi norma yang dilambangkan dalam posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Maksudnya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti kepala desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa bisa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun Tugas dan Fungsi BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :

1. Kedudukan BPD

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah.

2. Hak BPD

1. Mengawasi dan memintah keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Kewajiban BPD

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

4. Fungsi BPD

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datang dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa .

Menurut Siagian pengawasan adalah merupakan langkah dan sekaligus salah satu fungsi organik-organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawaslah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Didalam pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Antara perencanaan yang dibuat oleh BPD, baik dalam bentuk peraturan, program pembangunan dan lainnya tidak terlepas dari pengawasan, hal ini bertujuan sebagai proses pengamatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.6. Lembaga Legislatif dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Fungsi Dan Peran Legislasi dalam Praktik Sahabat.

Pada zaman Rasulullah SAW, *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd* adalah para sahabat, yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk islam (al-sa>biqu>n awwalu>n), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka yang sukses melaksanakan baik kaum *Ansar* maupun kaum *Muhajirin*.

Mereka ini bukanlah pilihan rakyat secara resmi, tetapi lantaran mereka mempunyai pengaruh yang kuat ditengah masyarakat. Karena itu Rasulullah SAW mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas Muamalah dan Kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam Musyawarah. Umatpun mengikutinya dan mempercayakan urusan-urusan mereka dalam Musyawarah Umat mengikutinya dan mempercayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan-urusan mereka pada orang pilihan tersebut. Pada masa *AL-khulafa' al-Rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari pada masa Nabi. Golongan *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd* adalah pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khlifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, beliau membentuk “ *Team Formatur*” yang beranggotakan enam (6) orang untuk memilih khalifah sesudah beliau wafat. Ulama fiqih menyebut anggota formatur tersebut sebagai *Ahl Al-Hall Wa al-'Aqd*.

Ketika Umar dan Ubaidah mem-bai'at Abu Bakar menjadi Khalifah, didahului oleh Basyir bin Sa'ad yang mem-bai'at Abu Bakar, setelah suku Aus melihat apa yang dilakukan oleh Basyir, maka mereka pun mem-bai'at Abu Bakar. Dari peristiwa pengangkatan Abu Bakar jadi khalifah ini ditari beberapa kesimpulan yaitu:

1. Khalifah dipilih dengan cara musyawarah diantara tokoh dan wakil umat.
2. Yang mengangkat itu adalah para wakil umat dan tokoh-masyarakat. Jadi sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada masa itu.
3. Di dalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari alternatif yang terbaik didalam menentukan siapakah calon khalifah yang paling memenuhi persyaratan.
4. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan, tidak menggunakan Voting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. tentang bermusyawarah dalam mengambil keputusan yaitu :

وَلَوْ كُنَّا إِغْلِيظَ الْقُلُوبَ نَفَضُوْا مِمَّا مَنَّا لَا يَلِدُ تَلَهُمْ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ عَفْوٌ غَفُورٌ لَّهُمْ شَاوِرٌ هُمْفِي الْأَمْرِ
طَائِلًا يَهْدِي بَالًا مَّتَوَكِّلِينَ

Artinya:”

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekak. Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Nya.” (Q.S. Ali Imran : 159).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mamatuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka memaafkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”(Q.S. Asyura: 38).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Penelitian Pendahuluan

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iron Bastion di Kuantan Singingi (2009) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan desa kurang terlaksana karena kurangnya kesadaran BPD dalam menjalankan tugas dan Fungsinya.

Siti Asiyah (2013) Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar disimpulkan analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa menunjukan bahwa perananan desa tidak baik dengan persentase 57,38 % dikatakan tidak baik karena kinerja BPD masih kurang maksimal disebabkan oleh adanya hambatan yaitu kurangnya ilmu tentang pemerintahan disebabkan oleh minimnya tingkat pendidikan BPD.

Anggi Utami (2013) Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak disimpulkan analisis fungsi BPD menunjukan bahwa peranan desa belum berjalan dengan maksimal, karena BPD kurang bekerja sama dengan kepala desa serta kurangnya sosialisasi segala yang menyangkut keadaan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang diuraikan dalam telaah pustaka, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

Gambar II
Kerangka Pemikiran Analisis Peran dan Fungsi BPD di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Undang-undang N0 6 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006:33) adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah:

1. Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desasebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Menurut Moh. Nazir (2005) definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.

Untuk menganalisis fungsi BPD sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa aspirasi masyarakat:

1. Menetapkan Peraturan Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Adapun operasional indikator penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini !.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	3	4
Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan Peraturan Desa Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan dan membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Menetapkan Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Menerima masukan dari masyarakat. Mencatat semua aspirasi masyarakat. Menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Melaksanakan kepentingan masyarakat. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat Desa. Mengawasi kinerja Kepala Desa. Mencatat hasil pengamatan Kepala Desa Menindak lanjuti hasil pengamatan Kepala Desa Melakukan rapat koordinasi hasil pengamatan yang telah ditindak lanjuti.

Sumber: Undang-undang No 6 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.11 Teknik Pengukuran

Dalam pengukuran ini terdapat satu variabel yang akan diukur yaitu, fungsi BPD. Adapun variabel fungsi BPD dengan indikatornya sebagai berikut

1. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

- a. Baik : Apabila anggota BPD Desa Simpang Pulau Beralo ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- b. Kurang Baik : Apabila BPD tidak dapat menjalankan salah satu dari merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
- c. Tidak Baik : Apabila BPD Desa Simpang Pulau Beralo tidak terlibat sama sekali dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

- a. Baik : Apabila BPD Desa Simpang Pulau Beralo Turun Langsung Ke Lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Kurang Baik : Apabila BPD hanya dapat menjalankan salah satu dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Tidak Baik : Apabila BPD Desa Simpang Pulau Beralo tidak dapat sama sekali menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengawasi Kinerja Kepala Desa

- a. Baik : Apabila BPD Desa Simpang Pulau Beralo mencatat semua hasil kinerja Kepala Desa.
- b. Kurang Baik : Apabila BPD Desa Simpang Pulau Beralo menjalankan salah satu dari mengawasi kinerja Kepala Desa.
- c. Tidak Baik : Apabila BPD Desa Simpang Pulau Beralo tidak dapat serta terlibat sama sekali dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.